
PENDIDIKAN EKONOMI DALAM NILAI-NILAI PANCASILA

Luh De Liska¹, Luh Putu Swandewi Antari²

^aFPBS IKIP PGRI BALI

luhdeliska86@gmail.com

^bFPBS IKIP PGRI BALI

swandewiantari@gmail.com

ABSTRACT

Education is a very important need for everyone because education is tasked with preparing human resources for the nation and state development process. Education currently functions as an effort to raise the quality of human civilization. In this case, learning and experience need to be directed at efforts to fight for the best forms of life, with respect for the dignity of the state waraga. Education is expected to bring development towards maturity of thought and in acting in life. This paper expects an increase in the economic education curriculum, where economic education can develop and be based on Pancasila values.

Key Words : economic education, Pancasila values

ABSTRAK

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap orang yang sangat penting karena pendidikan bertugas untuk menyiapkan sumber daya manusia bagi proses pembangunan bangsa dan negara. Pendidikan saat ini berfungsi sebagai suatu upaya menaikkan kualitas peradaban manusia. Dalam hal ini, pembelajaran dan pengalaman perlu diarahkan pada upaya memperjuangkan bentuk-bentuk kehidupan yang terbaik, dengan menghargai martabat waraga negara. Pendidikan diharapkan membawa perkembangan menuju kedewasaan berpikir dan dalam bersikap dalam kehidupan. Tulisan ini mengharapkan terjadi peningkatan dalam kurikulum pendidikan ekonomi, dimana pendidikan ekonomi dapat berkembang dan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Kata kunci : pendidikan ekonomi, nilai-nilai Pancasila.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 ayat (1) butir e menjelaskan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Pasal ini memberikan kesempatan kepada para dosen untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya dengan dukungan sarana, prasarana dan fasilitas yang memadai.

Selain itu, mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus terus mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kebijakannya dan menyelenggarakan Pancasila secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, filsafat negara, ideologi nasional sejak 18 Agustus 1945 sangat penting untuk diwariskan kepada generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia melalui pendidikan agar tidak kehilangan jati diri Bangsa Indonesia. Pendidikan di perguruan tinggi memegang peranan yang sangat penting untuk

mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di era reformasi yang ditandai dengan jatuhnya rezim Soeharto, Pancasila semakin sulit dan termarginalkan dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Euforia demokrasi yang mengusung kebebasan cenderung mengesampingkan aspek pendidikan moral. Pendidikan Pancasila yang dahulu dijadikan benteng moral bagi generasi muda telah 'dikerdilkan' ke dalam format Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang sarat dengan pendidikan demokrasi namun minim pendidikan moral. Dekadensi moral remaja akhir-akhir ini menyadarkan kita akan pentingnya 'menghidupkan' kembali Pendidikan Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa sebagaimana diamanatkan oleh MPR-RI. (Triyanto dkk, 2012).

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi mengidealisasikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu kebijakan ekonomi nasional harus bertumpu kepada asas-asas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan peran perseorangan, perusahaan swasta, badan usaha milik negara, dalam implementasi kebijakan ekonomi. Selain itu negara juga harus mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

memberdayakan masyarakat yang lemah termasuk fakir miskin dan anak terlantar, sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagaimana diamanatkan pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUD 1945. Kebijakan ekonomi nasional tersebut tidak akan terwujud jika tidak didukung oleh dana pembangunan yang besar.

Sebagai wahana pendidikan ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan ekonomi kerakyatan sebenarnya kita sudah mempunyai wadah perjuangan yaitu melalui koperasi. Koperasi adalah badan usaha dan wadah yang tepat untuk ekonomi rakyat berdasarkan paham cooperative. Kesemuanya mendukung percepatan upaya melaksanakan transformasi ekonomi dan transformasi sosial. Peran strategis ekonomi rakyat ini harus benar-benar dipahami. Wadah ekonomi rakyat yang paling tepat adalah koperasi apalagi kita memperhatikan doktrin kebangsaan dan doktrin kerakyatan yang diamanatkan oleh sistem ekonomi nasional yaitu Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945. Pertanyaan dasarnya adalah mengapa kita terjebak oleh pola pikir kompetitivisme dan tidak mengutamakan kooperativisme. Efisien tidak hanya bisa dicapai melalui persaingan yang ganas tetapi bisa juga dicapai melalui

kerjasama yang menghasilkan efisiensi sinergik yang berlipat.

Sebagai benteng dalam menghadapi tantangan pada era globalisasi yang semakin berkembang pada saat ini. Menerapkan nilai-nilai Pancasila bagi peserta didik, di era globalisasi bisa dilaksanakan dalam momentum-momentum yang tepat. Seperti pada saat peringatan hari sumpah pemuda, hari kemerdekaan, hari pahlawan dan hari besar nasional lainnya.

Peserta didik berusaha mengukir prestasi yang gemilang, belajar dengan sungguh-sungguh dengan segenap kemampuannya demi nama baik bangsa dan Negara, cinta serta bangga tanpa malu-malu menggunakan produk-produk dalam negeri demi kemajuan ekonomi Negara.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana menerapkan pendidikan ekonomi dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila oleh generasi muda.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah jenis deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2013) yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, dengan mengkaji hubungan antara

pendidikan ekonomi dengan nilai-nilai Pancasila.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan sehubungan dengan penelitian ini adalah :

(1) Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan data studi kepustakaan, dengan cara penelusuran terhadap semua bahan yang sejalan dengan permasalahan penulisan ini, dengan mengkaji hasil penelitian, mengutip mencatat buku-buku, menelaah teori –teori yang berkaitan dengan permasalahan .

(2) Dokumentasi, dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari berbagai bahan seperti dokumen, dan laporan-laporan termasuk berbagai peraturan yang terkait dengan variabel penelitian.

PEMBAHASAN

MAKNA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Pancasila secara legal formal telah diterima menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Mahfud M.D. (2009: 16-17) menegaskan bahwa penerimaan Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi diterima dan berlakunya kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara,

terutama dalam politik hukum nasional. Lebih lanjut, Mahfud M.D. menyatakan bahwa dari Pancasila dasar negara itulah lahir sekurang-kurangnya 4 kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa, baik secara ideologi maupun secara teritori.
- 2) Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedauplatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus.
- 3) Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bukanlah penganut liberalisme, melainkan secara ideologis menganut prisma antara individualisme dan kolektivitas dengan titik berat pada kesejahteraan umum dan keadilan sosial.
- 4) Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Indonesia bukan negara agama sehingga tidak boleh melahirkan kebijakan atau politik hukum yang berdasar atau

didominasi oleh satu agama tertentu atas nama apapun, tetapi Indonesia juga bukan negara sekuler yang hampa agama sehingga setiap kebijakan atau politik hukumnya haruslah dijiwai oleh ajaran berbagai agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan.

Masyarakat yang lahirnya sebelum orde baru sampai dengan orde baru pastilah tidak asing dengan sila-sila dan makna Pancasila. Namun generasi yang lahir setelah orde baru, perlu dipertanyakan lagi apakah mereka masih hafal sila-sila dalam Pancasila atau mungkin mereka hanya pernah mendengar kata Pancasila. Kembali penulis memaknai sila-sila yang ada dalam Pancasila sebagai berikut: Sila Pertama, Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Mengajarkan untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita warga Indonesia masing-masing memiliki agama dan keyakinan yang berbeda. Indonesia memiliki 5 agama yang di akui yaitu, Islam, Protestan, Khatolik, Hindu, dan Budha. Walau kita berbeda tetapi kita harus hidup rukun dengan sikap saling hormat-menghormati antar pemeluk agama lain di kehidupan sehari-

hari sebagai pengamalan dari Sila Pertama dalam kehidupan sehari-hari.

Sila Kedua, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Mengajarkan kita untuk memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung nilai – nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lakukan dengan membantu orang yang kesusahan tanpa memandang agama, derajat, ras dan golongan ekonomi yang berbeda.

Sila Ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga benar-benar menggambarkan Pancasila. *Bhineka Tunggal Ika*, yang artinya walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Indonesia memiliki bermacam-macam suku, adat, budaya, dan berjuta-juta penduduk yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Persatuan itu mendorong untuk tercapainya kehidupan yang bebas di Negara yang Merdeka dan Berdaulat.

Sila keempat, Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu diadakan musyawarah, dan keputusan musyawarah diusahakan secara mufakat. Menghormati setiap hasil

keputusan musyawarah dan melaksanakannya dengan rasa tanggungjawab. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bersikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Memupuk sikap suka bekerja keras dan menghargai karya orang lain yang bermanfaat, serta bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan kesejahteraan bersama.

PENDIDIKAN EKONOMI

Pada Undang – undang Dasar yang tertera pada No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mengemukakan bahwa, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya siswa dapat aktif mengembangkan pola pikir dirinya untuk memiliki kekuatan nilai religious, mengontrol diri, jati diri,

etika, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Maksudnya adalah suatu kesadaran manusia dalam berusaha mewujudkan sistematis pembelajaran aktif dan efisien. Kemudian sebagai wadah untuk mengembangkan bakat, menggali potensi diri, mengetahui jati diri serta membekali diri dalam hidup bermasyarakat.

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat. (Hamalik, 2001:79). Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan atau pertolongan dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak untuk mencapai kedewasaannya serta mencapai tujuan agar mampu melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri. Dengan pendidikan, manusia akan paham bahwa dirinya itu sebagai makhluk yang dikaruniai kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Bagi negara, pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan wahana dalam menerjemahkan

pesan-pesan konstitusi serta membangun watak bangsa.

Ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pengertian ekonomi yang lainnya mengartikan bahwa ekonomi sebagai pengukur tingkat kemajuan suatu negara. Sedangkan ekonomi secara umum dapat diartikan sebagai ilmu yang berhubungan tentang sumber material seseorang, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan.

Peranan ekonomi dalam dunia pendidikan cukup menentukan, tetapi bukan peranan utama. Dunia pendidikan adalah lembaga yang berkewajiban mengembangkan individu manusia. Kearah mana tujuan hidup seseorang dan hidup yang bagaimana diinginkan banyak dipengaruhi oleh pendidikan yang dia terima disekolah dan perguruan tinggi. Melihat kenyataan tersebut, sudah tentu pendidikan tidak akan membawa peserta didik kearah yang buruk, bahkan sebaliknya kearah yang lebih baik.

Fungsi ekonomi dalam dunia pendidikan adalah untuk menjaga kelancaran proses pendidikan. Bukan merupakan modal untuk mendapatkan keuntungan atau modal untuk dikembangkan. Disini ekonomi pendidikan sama fungsinya dengan sumber – sumber pendidikan

yang lain, seperti guru, kurikulum, alat peraga, dan sebagainya. Untuk menyukseskan misi pendidikan yang semuanya bermuara pada perkembangan peserta didik. Ekonomi merupakan salah satu bagian sumber pendidikan yang mampu membuat peserta didik mampu mengembangkan efeksi, kognisi dan keterampilan. Termasuk memiliki keterampilan tertentu untuk bias menjadi tenaga kerja yang andal atau menciptakan lapangan kerja sendiri, cinta pada pekerjaannya, memiliki etos kerja dan bisa hidup mandiri.

PENDIDIKAN EKONOMI DALAM NILAI-NILAI PANCASILA

Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa” pada aspek pendidikan ekonomi, aspek pendidikan merupakan aspek penting dalam upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya. Negara yang maju dan memiliki potensi akan maju dapat dilihat dari rata-rata pendidikannya. Seluruh nilai-nilai yang ada pada sila-sila Pancasila harus diimplementasikan pada kegiatan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Salah satunya pada kegiatan pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan harus ada pada sebuah negara karena pendidikan meruoakan hak dasar manusia untuk mencapai tujuan hidup. Dengan pendidikan derajat manusia dapat terangkat

dan dengan pendidikan pula tujuan bangsa dapat dicapai dengan sumber daya manusia yang terampil. Tak terkecuali nilai-nilai yang terdapat pada sila pertama Pancasila. Dunia pendidikan idealnya harus mampu mencetak siswa atau pelajar yang religious, taat dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Buah dari ketakwaan tersebut akan melahirkan cara berfikir yang jernih, yang jauh dari unsur-unsur untuk menipu orang lain. Ajaran agama juga akan melahirkan para siswa atau pelajar yang berakhlak mulia. Krisis yang saat ini masih melanda Indonesia diawali dengan krisis keberagamaan dan krisis akhlak. Agama mengajarkan kita tidak boleh berbuat curang, licik, korup, menyakiti orang lain. Makna lain yang tersirat dalam sila pertama Pancasila yakni makna agama sebagai sumber motivasi dan inovasi. Maksudnya disini agama dapat memberikan semangat dalam bekerja dan lebih kreatif serta produktif. Pada gilirannya dapat pula mendorong tumbuhnya pembaharuan dan penyempurnaan. Di Indonesia sendiri pendidikan merupakan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam usaha mewujudkan cita-cita tersebut tentunya tidak melalui proses yang mudah, maka dari itu kegiatan pendidikan sebagai

sarana untuk mencapai tujuan tersebut membutuhkan implikasi Pancasila sebagai sumber penyatu dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Sudah sepatutnya, kegiatan ekonomi didasarkan atas sila pertama Pancasila sehingga konsep – konsep serta praktik ekonomi selaras dengan nilai luhur agama. Ekonomi harus bertuhan, sehingga pada praktiknya tidak ada orang yang terus melakukan aksi ambil untung dengan cara menghalalkan segala cara. Atas dasar itu maka ekonomi Pancasila tidak semata-mata bersifat materialism, karena berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan yang timbul dari pengakuan kita pada Ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama. Keimanan dan ketakwaan menjadi landasan spiritual, moral dan etik bagi penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan. Dengan demikian sistem ekonomi Pancasila dikendalikan oleh kaidah-kaidah moral dan etika, sehingga pembangunan nasional berakhlak. Praktik ekonomi tidak sepatutnya dilakukan dengan menghalalkan segala cara guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Praktek-praktik ekonomi harus tetap mendasarkan dirinya kepada keadilan, transparansi sehingga satu sama lain saling menguntungkan. dimana bahwa pendidikan ekonomi itu tidak semata – mata bersifat material saja, tetapi mengajarkan untuk

senantiasa didasari oleh keimanan dan ahlak dalam pengendalian.

Sila kedua, “Kemanusiaan Yang Adil dan beradab”, ini bermakna menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu perlu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Dalam dunia pendidikan ekonomi mengandung makna bahwa dalam melakukan kegiatan perekonomian senantiasa berpedoman pada pengakuan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ini merupakan setiap kegiatan ekonomi harus menempatkan masyarakat sebagai subjek bukan sebagai objek dan juga dalam sila ini mengandung makna bahwa adanya kehendak untuk mewujudkan pemerataan sosial sesuai asa kemanusiaan sehingga diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Sila ketiga, “Persatuan Indonesia”, dimana mengandung makna bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia harus didasarkan rasa persatuan melalui kegiatan gotong royong, sehingga

masyarakat dapat membuka kesempatan ekonomi secara adil. Budaya gotong royong yang mengajarkan semangat tolong menolong untuk membangun kesejahteraan bersama tidak hanya bisa kita terapkan dalam kehidupan sosial masyarakat namun juga dapat kita terapkan dalam kehidupan sosial masyarakat namun juga dapat kita terapkan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Seperti hanya dalam kehidupan mengkonsumsi suatu produk itu mengutamakan produk yang ada dalam negeri sehingga uang atau modal itu tidak keluar dari Indonesia tapi berputar dalam masyarakat sehingga uang di belanjakan itu memberikan kesejahteraan bagi sesama. Namun faktanya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini malah sebaliknya, orang-orang lebih memilih untuk membeli produk yang datang dari luar, orang-orang lebih memilih pasar modern dari pasar tradisional, hanya untuk memnuhi popularitas pribadi, sehingga apa yang akan terjadi uang itu akan berputar hanya pada mereka yang memiliki modal besar atau pemilik pasar modern, sehingga seharusnya uang yang ada dapat memberikan kesejahteraan kepada sesama utamanya masyarakat yang notabene ekonomi rendah yang berjualan di pasar tradisional itu tidak terjadi, malah uang itu menyejahterakan orang yang memang sudah sejahtera secara finansial. Ini merupakan

salah satu bukti bahwa gotong royong mulai luntur oleh budaya – budaya individualis yang lebih mengutamakan kesejahteraan pribadi tidak peduli akan sesama. oleh karena itu sudah selayaknya hal ini kita sadari sebagai bangsa Indonesia, sudah selayaknya kita mencintai kreasi-kreasi produksi yang ada dalam negeri sehingga uang yang kita punya memberikan kesejahteraan kepada sesama. Cintailah produk yang ada dalam negeri sebagai bentuk kepedulian kita pada sesama untuk membudayakan gotong royong dalam kehidupan ekonomi sehingga tidak hilang identitas bangsa Indonesia.

Sila keempat, “Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, dalam hal ini segala keputusan yang diambil untuk menjalankan perekonomian sebuah negara haruslah secara bersama dengan selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan tanggung jawab. Pelaksanaan kegiatan ekonomi di Indonesia bermuara pada demokrasi Pancasila yang berarti bahwa setiap kegiatan ekonomi di Indonesia harus berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dimana masyarakat harus adil dalam kegiatan ekonominya.

Sila kelima, “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, keadilan sosial merupakan salah satu sifat masyarakat yang penuh dengan keadilan dan makmur dalam berbagai aspek bagi semua orang. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang berdiam diri didalam sebuah negara haruslah mendapatkan perlakuan yang adil baik dibidang hukum, politik, ekonomi, maupun budaya. Dalam sila ini tujuan bangsa Indonesia yang menginginkan perwujudan tata masyarakat adil dan makmur. Dalam kegiatan ekonomi di Indonesia yaitu harus diwarnai dengan keadilan sosial tanpa membedakan anatr suku, ras, golongan, dan desa atau kota.

SIMPULAN

Seluruh nilai-nilai yang ada pada sila-sila Pancasila harus diimplementasikan pada kegiatan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Salah satunya pada kegiatan pendidikan. Praktik ekonomi tidak sepatutnya dilakukan dengan menghalalkan segala cara guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Praktek-praktik ekonomi harus tetap mendasarkan dirinya kepada keadilan, transparansi sehingga satu sama lain saling menguntungkan. dimana bahwa pendidikan ekonomi itu tidak semata – mata bersifat material saja, tetapi mengajarkan untuk senantiasa didasari oleh keimanan dan ahlak dalam pengendalian.

SARAN

Pendidikan ekonomi yang diberikan kepada mahasiswa dan masyarakat haruslah berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sehingga akan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Undang – Undang Pendidikan No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Hamalik, Oemar. 2001. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta : Bumi Aksara.

Integritas Nilai-Nilai Pancasila ke Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Moral Bagi Peserta Didik (Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah), Triyanto, dkk, dipublikasikan dalam Prosiding Semanas LPP UNS, 03 Nop. 2012, ISBN 978-602-99130-1-9.

Sugiyono.2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabetha. Bandung.

Mahfud M.D. 2009. *Pancasila Hasil Karya dan Milik Bersama*, Makalah pada Kongres Pancasila di UGM tanggal 30 Mei 2009.

Sri Jani, dkk. 2008. *Etika Berwarganegara*. Salemba Empat : Jakarta.

Rukiyati, dkk. 2008. Pendidikan